



# JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

Edisi 01/ Januari 2018

ISSN : 2085-4862

## PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA

**Utang Rosidin** | Agama Dalam Naskah Haluan Negara Sebagai Rujukan Pembangunan Nasional

**Moh Najib** | Agama Dalam Tata Kehidupan Bangsa Indonesia

**Aden Rosadi** | Peran Dan Fungsi Negara :  
(Upaya Mencegah Radikalisme Dan Pluralisme Agama)

**Fauzan Ali Rasyid** | Sinergitas Agama Dan Negara

**Ahmad Fathonih** | Menata Kerukunan Hidup Umat Beragama  
Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

**M Alfian Alfian M** | Agama Dan Keyakinan Dalam Konstitusi  
Dan Masalah Kebangsaan Dewasa Ini

**Firdaus Syam** | Agama Sebagai Solusi Pembangunan (Revolusi)  
Mental Dan Kelembagaan

**Aris Munandar** | Konflik Agama Dan Transformasi Struktural:  
Membangun Kebijakan Pembangunan Agama Yang Inklusif

**Tohadi** | Kedudukan Agama Dan Kepercayaan  
Pasca Putusan MK Nomor: 97/PUU-XIV/2016:  
Suatu Catatan Kritis

**Asep A. Sahid Gatara** | Haluan Negara Dan Ketuhanan:  
Memperkuat Tuntunan Penyelenggaraan Negara



# **JURNAL MAJELIS**

## **Media Aspirasi Konstitusi**

### **PERCEPATAN PEMBANGUNAN BIDANG AGAMA**

---

Badan Pengkajian MPR RI

2018

## **Susunan Dewan Redaksi**

**Penasehat** : DR. (H.C.) Zulkifli Hasan, SE., M.M.  
Mahyudin, S.T., M.M.  
E.E. Mangindaan, S.IP.  
DR. Hidayat Nur Wahid, M.A.  
DR. (H.C.) Oesman Sapta

**Pengarah** : DR. Bambang Sadono, S.H., M.H.  
DR. Tb. Hasanuddin, S.E., M.M.  
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.  
Martin Hutabarat, S.H.  
Tb. Soenmandjaja

**Penanggung Jawab** : Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

**Wakil Penanggung Jawab** : Dra. Selfi Zaini

**Pemimpin Redaksi** : Drs. Yana Indrawan, M.Si.

**Redaktur Pelaksana** : Tommy Andana, S.IP, M.AP.

Agip Munandar, S.H., M.H.

Drs. Joni Jondriman

**Editor** : Siti Aminah; Pradita Devis Dukarno; Otto Trengginas Setiawan;  
Muhammad Reza

**Pengumpul Bahan** : M. Haris Purwa Priyambada; Riswandi; Endang Ita; Rindra Budi Priyatmo; Dian Kartika Sari; Bayu Nugroho; Widhi Aditia Putra; Kartika Lestari Sianipar; Elias Petege; Wafistrietman Corris; Rani Purwati Kemala Sari; Wasinton Saragih

## **Alamat Redaksi**

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha, Lantai 3,

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420

E-mail : [biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id](mailto:biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id) / [biro.pengkajian@gmail.com](mailto:biro.pengkajian@gmail.com)

## DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Kata Pengantar Redaksi	III
Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	VII
Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia	IX
Agama Dalam Naskah Haluan Negara Sebagai Rujukan Pembangunan Nasional - Utang Rosidin	1
Agama Dalam Tata Kehidupan Bangsa Indonesia - Moh Najib	11
Peran Dan Fungsi Negara : (Upaya Mencegah Radikalisme Dan Pluralisme Agama) - Aden Rosadi	33
Sinergitas Agama Dan Negara - Fauzan Ali Rasyid	45
Menata Kerukunan Hidup Umat Beragama Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia - Ahmad Fathonih	57
Agama Dan Keyakinan Dalam Konstitusi Dan Masalah Kebangsaan Dewasa Ini - M. Alfian Alfian M.	65
Agama Sebagai Solusi Pembangunan (Revolusi) Mental Dan Kelembagaan - Firdaus Syam	75
Konflik Agama Dan Transformasi Struktural: Membangun Kebijakan Pembangunan Agama Yang Inklusif - Aris Munandar	87
Kedudukan Agama Dan Kepercayaan Pasca Putusan MK Nomor: 97/PUU-XIV/2016: Suatu Catatan Kritis - Tohadi	105
Haluan Negara Dan Ketuhanan: Memperkuat Tuntunan Penyelenggaraan Negara - Asep A. Sahid Gatara	117





## **Pengantar Redaksi**

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan Percepatan Pembangunan Bidang Agama dapat diselesaikan. Jurnal ini berisi artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dari berbagai kalangan yang merupakan media untuk menjangking aspirasi masyarakat yang dilakukan MPR. Artikel dalam Jurnal Majelis ini memuat kajian dan pendapat masyarakat yang disampaikan melalui tulisan dari para pakar dengan berbagai latar belakang keilmuan.

Pemuatan artikel dengan tema Percepatan Pembangunan Bidang Agama merupakan salah satu ikhtiar yang dilakukan oleh MPR dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi MPR periode 2009-2014 sebagaimana terdapat pada Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 yaitu antara lain tentang melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara.

Penyusunan Jurnal Majelis dimaksudkan untuk memberikan informasi mendalam sekaligus membangun pemahaman yang sama mengenai wawasan kebangsaan dan sistem ketatanegaraan dari sisi kajian akademis, sekaligus merupakan salah satu cara MPR menjangking aspirasi masyarakat dan daerah yang seluas-luasnya sebagai bahan masukan untuk Anggota MPR dan masyarakat. Sejalan dengan tujuan penyusunan jurnal ini, artikel yang dimuat merupakan tulisan para pakar dari berbagai latar belakang keilmuan dan profesi. Jurnal ini disajikan sesuai dengan gagasan aslinya, baik yang disampaikan dalam kegiatan kajian yang dilakukan oleh MPR maupun yang disampaikan secara langsung. Dalam jurnal ini memuat pendapat dan pemikiran dari:

Utang Rosidin dengan judul tulisan "Agama Dalam Naskah Haluan Negara Sebagai Rujukan Pembangunan Nasional" mengemukakan bahwa Hubungan antara agama dengan negara merupakan hubungan yang bersifat *intersectional*, yang berarti adanya hubungan persinggungan antara agama dan negara, tidak sepenuhnya terintegrasi dan tidak juga sepenuhnya terpisah. Legitimasi agama tetap diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yang diharapkan menjadi penentu integrasi bangsa, sebagai sumber etika penyelenggaraan negara, sehingga akhirnya menjadi haluan bagi

pengembangan pembangunan nasional.

Moh. Najib dengan judul tulisan “Agama Dalam Tata Kehidupan Bangsa Indonesia” mengemukakan bahwa Agama tidak bisa dipisahkan dalam tata Kehidupan bernegara di Indonesia karena peran agama telah teruji dan berperan besar dalam tata kehidupan bangsa Indonesia sejak pra kemerdekaan, zaman kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Oleh karena itu upaya-upaya untuk memisahkan peranan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia pasti akan menghadapi perlawanan dan mengalami persoalan besar. Kehidupan beragama dan masyarakat Indonesia bisa dilihat dari fakta historis, antropologis, sosiologis, dan politis.

Aden Rosadi dengan judul tulisan “Peran Dan Fungsi Negara : Upaya Mencegah Radikalisme Dan Pluralisme Agama)” mengemukakan bahwa peran dan fungsi Negara sebagai salah satu lembaga yang bertanggungjawab dalam menjalankan hubungan antara pemerintah, tokoh agama dan masyarakat sebagai tiga kelompok kepentingan yang tidak bisa dipisahkan dalam mengembangkan kesadaran pluralisme dalam kehidupan beragama.

Fauzan Ali Rasyid dengan judul tulisan “Sinergitas Agama dan Negara” menyampaikan pandangan bahwa bagi al-Ghazali, antara agama dan negara memiliki keterkaitan yang sangat signifikan, sehingga al-Ghazali menganalogikan agama dan raja sebagai ‘dua anak kembar’, dimana agama adalah suatu pondasi, sedangkan raja adalah penjaganya. Sesuatu tanpa pondasi akan mudah runtuh dan suatu pondasi tanpa penjaga akan hilang. Keberadaan raja merupakan keharusan bagi ketertiban dunia, ketertiban dunia merupakan keharusan bagi ketertiban agama, dan ketertiban agama merupakan keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat nanti.

Ahmad Fathonih dengan judul tulisan “Menata Kerukunan Hidup Umat Beragama Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia” mengemukakan bahwa Toleransi menjadi keniscayaan sosial bagi seluruh umat beragama dalam menata kehidupan bersama. Sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia telah mempunyai konstitusional yang memelihara keyakinan umat masing-masing. Secara lahiriyah, toleransi umat beragama di Indonesia merupakan harapan bangsa-bangsa di dunia. Boleh jadi toleransi beragama merupakan kunci perdamaian dunia.

M. Alfian Alfian M. dengan judul tulisan “Agama Dan Keyakinan Dalam konstitusi Dan Masalah Kebangsaan Dewasa Ini” mengemukakan bahwa UUD NRI tahun 1945 secara jelas (terutama pada Pasal 29) mengakomodasi realitas kehidupan masyarakat di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari konteks sistem kepercayaan yang dalam perkembangannya dipengaruhi oleh keberadaan agama-agama besar dunia (Hindu, Budha, Islam, Kristen/Katolik). Karenanya, memposisikan agama dan keyakinan di luar realitas kehidupan bangsa, merupakan pandangan dan cara pikir yang ahistoris.



Firadaus Syam “Agama Sebagai Solusi Pembangunan (Revolusi) Mental dan Kelembagaan” mengemukakan pandangannya bahwa Pembangunan bidang agama sebagaimana pembangunan bidang pendidikan memiliki tujuan mulia dalam konteks pembangunan nasional secara keseluruhan. Kemuliaan itu memiliki kaitan yang erat dengan pembangunan karakter bangsa dalam wujudnya revolusi mental yang dicanangkan pemerintah dewasa ini. Dalam upaya pencapaian tujuan terjalannya peningkatan kualitas umat beragama pada tahapan pengamalan ajaran agama dan penghayatan nilai-nilai keagamaan. Hal itu berarti tidak hanya membangun kesadaran berpengetahuan agama, lebih dari itu diharapkan tumbuhnya kesadaran akal dan kesadaran batiniah.

Aris Munandar dengan judul tulisan “Konflik agama dan Transformasi Struktural : Membangun Kebijakan Pembangunan Agama yang Inklusif” mengemukakan pandangan bahwa Agama adalah salah satu institusi sosial yang memberikan makna dan arah terhadap perilaku manusia di dalam masyarakat. Khususnya dalam konteks kehidupan bernegara di Indonesia, eksistensi negara sebagai komunitas politik tidak bisa dilepaskan dari kontribusi umat Islam sebagai kelompok keagamaan. Secara historis, sentimen keislaman menjadi motivasi dan inspirasi bagi persatuan nasional sebagai modal politik yang sangat penting untuk membangun Indonesia sebagai negara-bangsa. Karena itu, negara tidak bisa mengabaikan eksistensi kepentingan keagamaan sebagai salah satu program dan sekaligus indikator pencapaian keberhasilan pembangunan nasional.

Tohadi dengan judul tulisan “Kedudukan Agama dan Kepercayaan Pasca Putusan MK Nomor: 97/PUU-XIV/2016: Suatu Catatan Kritis” menelaah tentang pertimbangan dan makna Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 97/PUU-XIV/2016 tertanggal 7 November 2017 terkait kedudukan agama dan kepercayaan. Kemudian memaparkan implikasi dari putusan tersebut baik dilihat dari sisi teoritik maupun prakteknya dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.

Asep A. Sahid Gatara dengan judul tulisan “Haluan Negara dan Ketuhanan: Memperkuat Tuntutan Penyelenggaraan Negara” mengemukakan pandangan bahwa Pembentukan haluan negara semacam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan atau Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) perlu dasar daulat Ketuhanan. Hal itu seiring dengan Indonesia sebagai negara berketuhanan seperti termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945. Dalam konteks itu, Ketuhanan merupakan tuntunan teologis sekaligus etis bagi penyelenggaraan negara. Tuntunan tersebut menjadi landasan pacu bagi pelaksanaan tuntunan-tuntunan lainnya, termasuk tuntunan ideologis, tuntunan strategis-teknokratis dan tuntunan normatif-yuridis

Akhir kata, ucapan terima kasih disampaikan kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaannya menyampaikan tulisan baik secara langsung ataupun dalam kegiatan-kegiatan MPR untuk dimuat dalam Jurnal Majelis. Harapan kami, semoga Jurnal Majelis ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi masyarakat luas

PEMIMPIN REDAKSI,

t.t.d.

YANA INDRAWAN





## **Sambutan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia**

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang memiliki peranan sangat strategis dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan wewenang dan tugas yang diatur dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangatlah fundamental yakni mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagai pembentuk konstitusi, lebih lanjut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, menugasi MPR untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR yang dalam pelaksanaannya menggunakan metode sosialisasi empat pilar MPR RI.

Tugas penting lainnya dalam mendukung pelaksanaan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah tugas MPR RI untuk melakukan pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan, konstitusi, dan implementasinya serta melakukan penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah, yang apabila dicermati dimensinya sangat luas melingkupi berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya serta pertahanan dan keamanan baik dalam tataran konsepsi maupun implementasi.

Selaras dengan itu, Sekretariat Jenderal MPR RI sebagai *supporting system* bagi pelaksanaan tugas-tugas konstitusional MPR RI senantiasa berupaya untuk menyerap dan mengelola dengan baik setiap masukan, gagasan, pemikiran, dan rekomendasi yang terhimpun dari berbagai pelaksanaan tugas dan wewenang konstitusional MPR, salah satunya aspirasi mengenai Percepatan Pembangunan Bidang Agama.

Penerbitan Jurnal Majelis tentang “Percepatan Pembangunan Bidang Agama” ini didasari dengan semangat untuk memberikan informasi yang mendalam sekaligus membangun pemahaman yang utuh dan lebih luas mengenai aspirasi masyarakat mengenai Pembangunan Bidang Agama. Naskah-naskah yang dimuat berisi tentang informasi dan kajian ketatanegaraan yang ditulis oleh para pakar, akademisi, serta tokoh masyarakat dari berbagai kalangan.

Dengan penerbitan Jurnal Majelis ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mengetahui dan melakukan kajian tentang Percepatan Pembangunan Bidang Agama. Dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang semakin luas dan mendalam mengenai Percepatan Pembangunan Bidang Agama tentu akan menjadi masukan yang berharga bagi Majelis dalam kerangka melakukan kajian tentang reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara.

Akhir kata, semoga penerbitan Jurnal Majelis ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat, majelis, bangsa, dan negara Indonesia.

SEKRETARIS JENDERAL MPR,

t.t.d.

MA'RUF CAHYONO



## **Sambutan Pimpinan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pertama kali ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah diubah pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 adalah landasan bagi berjalannya sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Berbagai muatan materi yang terkandung di dalamnya telah mengalami perubahan sehingga mengubah praktek penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah perubahan memberikan nuansa yang sangat berbeda pada tataran muatan yang terkandung di dalamnya. Banyak muatan yang secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum mengalami perubahan yang mendasar. Setiap perubahan yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari paham Indonesia sebagai negara hukum. Paham konstitusionalisme merupakan upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan negara, sehingga setiap perubahan yang terjadi harus mencerminkan sikap warga negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum sebagai pelaksanaan ketatanegaraan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, muatan-muatan yang terkandung di dalam konstitusi seharusnya dapat langsung dirasakan bagi masyarakat Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sistem ketatanegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, idealnya mampu menampung berbagai dimensi strategis dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum serta pertahanan dan keamanan. Aspirasi masyarakat menghendaki adanya kejelasan, kepastian, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupannya melalui sistem ketatanegaraan yang presisi, akuntabel, dan terukur demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah produk politik sebagai resultante dari berbagai kepentingan politik masyarakat dan daerah, yang niscaya akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penataan sistem ketatanegaraan sangat penting untuk lebih membangun sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.



Pada tahun 2014, pada Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, terjadi momentum penting yaitu telah diputuskannya Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2009-2014 untuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2014-2019. Dalam Rekomendasi tersebut antara lain disebutkan sebagai berikut:

1. Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara adendum;
2. Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara;
3. Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika* secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa;
4. Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika* serta implementasinya;
5. Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR RI;
6. Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara;
7. Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi MPR sebagaimana terdapat pada Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014, MPR melakukan berbagai kegiatan yang membuka ruang untuk penjangkauan aspirasi yang seluas-luasnya dari berbagai kalangan dan berbagai bidang baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Kajian tentang 7 (tujuh) rekomendasi yang terdapat pada keputusan MPR tersebut telah dilakukan dengan cara menghimpun pandangan dan pendapat dari masyarakat, daerah, dan lembaga negara.

Penerbitan Jurnal Majelis tentang “Percepatan Pembangunan Bidang Agama” merupakan salah satu media bagi MPR untuk menjangkau aspirasi, pemikiran, dan gagasan terkait upaya mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR.

Naskah-naskah yang terangkum dalam Jurnal Majelis ini merupakan aspirasi yang berkembang dan berhasil dihimpun dari kalangan masyarakat maupun akademisi. Himpunan artikel maupun penelitian ini berisikan gagasan-gagasan penting untuk memperkaya khazanah pemikiran mengenai upaya-upaya penataan sistem ketatanegaraan Indonesia, utamanya terkait dengan Pembangunan Bidang Agama.

Saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas penerbitan Jurnal Majelis tentang Percepatan Pembangunan Bidang Agama, tentu hal ini tidak saja bermakna sebagai wujud akuntabilitas kinerja semata, melainkan juga sebagai wujud sumbangsih pemikiran bagi Majelis, Bangsa, dan Negara Indonesia. Sekian dan terima kasih.

BADAN PENGKAJIAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,

t.t.d

Dr. BAMBANG SADONO, S.H., M.H.

Wakil Ketua,

t.t.d

DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.

Wakil Ketua,

t.t.d

RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.SC., M.M.

Wakil Ketua,

t.t.d

MARTIN HUTABARAT, S.H.

Wakil Ketua,

t.t.d

TB. SOENMANDJAJA





## PERAN DAN FUNGSI NEGARA : (Upaya Mencegah Radikalisme dan Pluralisme Agama)

---

Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag <sup>1</sup>

### Abstrak

*Secara konseptual, peran dan fungsi Negara sangat vital dengan berbagai macam pertimbangan. Pertama, kesadaran masyarakat mengenai arti penting pandangan hidup yang lebih toleran, terbuka dan lebih pluralis di tengah-tengah perkembangan masyarakat dunia. Sementara itu, nilai kegamaan yang dianut menuntut terjadinya penyesuaian terhadap perkembangan zaman. Hal ini berakibat terjadinya krisis identitas yang berujung pada sikap oposisi di sebagian besar masyarakat, khususnya yang berhubungan dengan eksistensi agama-agama lain. Kedua, perubahan tersebut berdampak pada munculnya sikap radikalisme masyarakat dengan mengusung tema-tema agama. Pembangunan rumah ibadah yang sejatinya merupakan "rumah Tuhan" bagi setiap umat beragama, dianggap sebagai bahaya yang dapat mengancam eksistensi masyarakat dan penganut agama lain. Sistem nilai yang terbangun sebagai masyarakat tertindas menjadi salah satu motivator dan katalisator lahirnya radikalisme beragama di tingkat masyarakat arus bawah. Ketiga, kebijakan pemerintah menyangkut pembangunan kerukunan antarumat beragama. Bagian terakhir ini berhubungan dengan konsep good governance. Sebagai sebuah pendekatan institusional, konsep penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (good governance) diartikan sebagai interaksi antara penyelenggara negara (pemerintah) dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut catatan Bank Dunia, setidaknya ada empat dimensi yang penting dalam good governance, yakni keteladanan, kerangka hukum yang efektif, informasi yang sejalan dengan transparansi (atau akuntabilitas pemerintah) dan tersedianya tenaga kerja terdidik. Dalam konteks ini, peran dan fungsi Negara sebagai salah satu lembaga yang bertanggungjawab dalam menjalankan hubungan antara pemerintah, tokoh agama dan masyarakat sebagai tiga kelompok kepentingan yang tidak bisa dipisahkan dalam mengembangkan kesadaran pluralisme dalam kehidupan beragama.*

**Kata Kunci :** Agama, Negara, Pluralisme

---

<sup>1)</sup> Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

## A. PENDAHULUAN

Diskursus tentang peran dan fungsi negara dalam kehidupan, secara umum berangkat dari beberapa pengertian tentang konsep negara yang banyak berkembang sampai saat ini. Arif Budiman seorang sosiolog menyebutkan, ada dua kesimpulan yang bisa menjelaskan tentang lembaga negara tersebut. *Pertama*, negara merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar di dalam sebuah masyarakat. Negara dapat memaksakan kehendaknya kepada warga atau kelompok yang ada di masyarakat. Bahkan kalau perlu, negara memiliki keabsahan untuk menggunakan kekerasan fisik dalam memaksakan kepatuhan masyarakat terhadap perintah-perintah yang dikeluarkannya. *Kedua*, kekuasaan yang sangat besar ini diperoleh karena negara merupakan pelembagaan dari kepentingan umum. Sebagai lembaga yang mewakili kepentingan umum, negara dapat memaksakan kehendaknya melawan kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok di masyarakat yang jumlahnya lebih kecil.<sup>3</sup>

Sementara itu, Alfred Stepan mengartikan negara sebagai sesuatu yang lebih dari "pemerintah". Negara merupakan suatu sistem administratif, legal, birokratis dan koersif yang berkesinambungan serta berusaha untuk tidak hanya mengelola aparat negara, tetapi juga untuk menyusun

hubungan antara kekuasaan sipil dan pemerintah, serta untuk menyusun berbagai hubungan mendasar dalam masyarakat politik dan masyarakat sipil.<sup>4</sup>

Sedangkan untuk melihat negara dalam kaitannya dengan struktur sosial, ekonomi dan ideologi, Farchan Bulkin, seorang ahli ekonomi politik berpendapat bahwa negara bisa dipandang sebagai sebuah institusi umum yang imperatif sifatnya, yang demi keselamatan ekonominya harus menguasai sebagian sumber ekonomi nasional melalui sistem perpajakan dan membelanjakannya sesuai kebijakan umum ekonomi. Sehingga negara memiliki relevansi ekonomi. Struktur pendapatannya tergantung pada struktur ekonomi dan juga merefleksikan struktur ekonomi yang dominan.<sup>5</sup>

Pada dasarnya, negara juga memiliki berbagai fungsi. Merujuk pada laporan bank dunia, Fukuyama secara umum melihat cakupan fungsi negara pada sebuah rentang aktivitas, yaitu fungsi minimal, fungsi menengah dan fungsi aktivis (*Fukuyama, 2004*). Pada fungsi minimal negara hanya berfungsi untuk dapat penyedia barang-barang publik, fungsi penegakan hukum, pertahanan, kesehatan, pengelolaan ekonomi makro dan perlindungan terhadap kaum miskin. Pada tingkat menengah (*intermediate*), sudah ditujukan untuk hal-hal pendidikan, lingkungan, pengaturan persaingan usaha,

<sup>3</sup>) Budiman, A. (1997). *Teori Negara, Negara, Kekuasaan Dan Ideologi*. Jakarta, DKI, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.

<sup>4</sup>) Stepan, Alfred. (1996). *Militar dan Demokratisasi*. Jakarta: Grafit

<sup>5</sup>) Bulkin, F. (1984, Februari 2). *Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian*. Prisma, 7.



asuransi, jaminan sosial dan regulasi di bidang keuangan. Sementara pada fungsi aktivis cakupannya telah mencapai kebijakan industrial dan redistribusi kekayaan.

Kendati demikian, dalam implementasinya menunjukkan bahwa berbagai fungsi yang dimiliki oleh negara seringkali tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Berbagai persoalan yang terjadi antara lain adalah munculnya berbagai kekuatan politik lain yang mampu menggunakan posisi tawarnya yang sangat kuat kepada negara untuk dapat memperoleh "hak-hak istimewa" dan mampu mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh negara. Akibatnya, banyak pihak kemudian merasa dirugikan akibat kebijakan tersebut. Karenanya kemudian muncul berbagai teori yang berusaha menjelaskan mengenai lemahnya posisi tawar negara tersebut. Salah satunya adalah otonomi relatif negara. Menurut *"The State in Post Colonial Societies: Pakistan and Bangladesh"*, disebutkan oleh Alavi bahwa negara pada masyarakat pasca kolonial mempunyai otonomi relatif terhadap kelas-kelas sosial, karena lemahnya serta kurang berkembangnya kelas-kelas sosial tersebut. Selain itu Alavi juga melihat bahwa ada tiga kelas dominan yang lahir di negara-negara pasca kolonial. Ketiga kelas tersebut adalah borjuasi metropolitan, borjuasi lokal dan kelas pemilik tanah. Karena

kepentingan ketiga kelas tersebut tidak berbeda, maka negara dapat dengan mudah memediasi segala kepentingan mereka.<sup>6</sup>

Otonomi relatif ini sebenarnya tidak hanya terdapat di negara-negara pasca kolonial saja. Di negara-negara maju juga mengenal otonomi relatif ini. Di negara industri maju otonomi relatif terletak pada ketidakmampuan fraksi-fraksi dalam kelas borjuasi yang hegemonis untuk menguasai negara sepenuhnya. Sedang pada negara pasca kolonial ketidakmampuan terletak pada berbagai kelas dominan untuk menguasai negara.<sup>7</sup>

## B. RADIKALISME DAN PLURALISME AGAMA

Radikalisme dan pluralisme agama merupakan dua paradigma yang saling bertolak belakang dalam kehidupan beragama, selain di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya; sebab keduanya selain disebut sebagai *opposition biner*, juga merupakan dua hal yang sulit untuk kompromikan dan dipisahkan dalam kehidupan beragama. Pada satu sisi, radikalisme berlandaskan pada paradigma yang bersifat eksklusif meniadakan orang lain (*the other*), *rigid*, tertutup, ekstrimisme dan tidak jarang bersifat militeristik; sedang pluralisme mengedepankan paradigma yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keterbukaan dan inklusif.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Hadiz, V. R. (1999). Politik Pembebasan: Teori-Teori Negara Pasca Kolonial. Yogyakarta, DIY, Indonesia: Pustaka Pelajar.

<sup>7</sup> Hadiz, V. R. (1999). Politik Pembebasan: Teori-Teori Negara Pasca Kolonial. Yogyakarta, DIY, Indonesia: Pustaka Pelajar.

<sup>8</sup> Paradigma kekerasan seringkali digunakan secara berbeda-beda sesuai dengan kepentingan yang diusung masing-masing, namun tetap memiliki makna yang sama. Bisa disebut dengan "puritanisme", "nativisme", "ekstrimisme", "fanatisme", "militanisme" dan lain sebagainya. Lihat Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo dalam Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo (peny.), *Radikalisme Agama* (Jakarta: PPIM-IAIN, 1998), h. xvi.



Karena itu, mendiskusikan masalah kerukunan antarumat beragama, sebagai implementasi pluralisme, berarti langsung ataupun tidak mengasumsikan adanya kemungkinan berbagai penganut agama bertemu dalam sebuah landasan bersama (*common platform*). Sebab logika kerukunan dan toleransi ialah sikap saling pengertian dan penghargaan, yang pada urutannya mengandung logika titik temu, sekalipun tentu saja hanya kepada hal-hal yang prinsipil. Hal-hal terperinci, seperti ekspresi-ekspresi simbolik dan formalistik, tentu sulit dipertemukan. Masing-masing agama, bahkan masing-masing kelompok intern sebuah agama tertentu sendiri, memiliki idiomnya yang khas dan bersifat esoterik, yakni "hanya berlaku secara intern". Karena itu, ikut campur seorang penganut agama dalam permasalahan rasa kesucian seseorang dari agama lain adalah tidak rasional dan *absurd*.

Pluralisme, kerukunan dan toleransi antarumat beragama sebenarnya bukan barang asing. Hidup berdampingan kelompok non-Muslim, khususnya etnis China yang mayoritas beragama Konghucu, Budha dan Hindu, telah berjalan sejak ratusan tahun yang lalu; kuil-kuil kuno dan perkampungan China-seperti *Chinese town*-pun menjadi saksi sejarah betapa kehidupan beragama telah berjalan secara harmonis. Tradisi keagamaan seperti pengajian rutin majelis ta'lim, ceramah agama, tahlil,

shalawat dan ratiban, tetap dipegang sebagai nilai-nilai keagamaan yang telah berjalan sejak lama. Bahkan saat ini, pendidikan keagamaan tradisional yang terlembagakan dalam pondok pesantren tetap eksis.

Seiring dengan perkembangan industrialisasi ini, gejala-gejala sosial-psikologis sebagai akibat perubahan yang sangat cepat dapat dimanipulasi dengan mudah untuk tujuan-tujuan tertentu. Hal ini disebabkan karena gejala-gejala ini dengan sendirinya diikuti dengan perasaan kecewa, dendam, dan keinginan emosional untuk melawan "kemapanan" (*establishment*). Kemapanan di sini bisaanya dianalogikan dengan pemerintah dan kelompok elit penguasa (*ruling elite*). Namun, gejala-gejala tersebut dapat memotivasi timbulnya inisiatif dalam mencari faktor pengimbang dan kompensasi. Pencarian faktor pengimbang ini biasanya disalurkan dalam dua bentuk, baik negatif maupun positif. Contoh dari pengimbang yang negatif adalah munculnya sikap-sikap radikal yang sering dijadikan mediator untuk "mengisi" kekecewaan dan ketidakpuasan tersebut.<sup>9</sup> Bahkan dalam pandangan Morris Janowitz, dampak dari perubahan sosial tersebut adalah adanya prasangka atau *stereotype* yang cenderung destruktif dan penuh dengan stigma mengenai kelompok atau golongan tertentu, sehingga sulit menunjang terjadinya proses perubahan sosial yang positif menuju demokrasi dan pluralisme.<sup>10</sup>

<sup>9</sup>) Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Jld. 1 (Jakarta: Paramadina-Mizan-CSL, 2006), h. H. 724.

<sup>10</sup>) *Ibid.*, Jld. II, h. 800.

Dalam hubungan ini, terdapat beberapa kerangka pemikiran yang menarik untuk ditelaah sebagai analisis sosial terhadap permasalahan radikalisme. Usman Pelly, mantan guru besar Antropologi IKIP Medan, mengemukakan mengenai adanya tiga sumber konflik dalam masyarakat. Pertama, perebutan sumber daya, alat-alat produksi dan kesempatan ekonomi; kedua, perluasan batas-batas kelompok etnis dan sosial-budaya; serta ketiga, perbenturan kepentingan politik, ideologi dan agama. Ketiganya lebih banyak didapati dalam masyarakat perkotaan atau masyarakat majemuk yang mulai tumbuh karena perkembangan industri yang pesat dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Intensitas konflik dengan faktor-faktor kemajemukan masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni horisontal dan vertikal. Faktor-faktor horisontal meliputi etnis/ras atau asal-usul keturunan; bahasa daerah; adat istiadat; agama; dan kehidupan sosial-politik.<sup>11</sup> Apabila kemajemukan horisontal merupakan *ascribed factors*, sedang faktor-faktor kemajemukan vertikal lebih banyak berciri *achievement factors*.

Permasalahan tersebut berujung pada kesadaran masyarakat sebagai masyarakat yang tertindas (*oppressed society*). Tertindas dari perkembangan globalisasi yang mewujudkan dalam bentuk hegemoni industri yang kurang memperhatikan aspek lokalitas masyarakat dan lebih mementingkan

etnis dan agama tertentu. Dalam konteks ini, nampaknya cukup relevan ketika Kuntowijoyo mengatakan bahwa masyarakat yang bekerja di sektor industri atau nonpertanian itulah yang apabila persoalan, seperti pengangguran atau penghinaan, mudah menjadi agresif emosional, punya *collective behavior* tanpa harus digerakkan pihak ketiga atau dikipasi.<sup>12</sup>

Bentuk gagasan yang terdapat dalam konsep radikalisme ini bisa diterapkan untuk melihat gejala radikalisme sosial yang berkembang di masyarakat. Sebagai *weltanschauung* atau pandangan dunia (*worldview*) sekaligus pengalaman hidup (*lebensewelt*), radikalisme agama yang muncul dalam bentuk penolakan pembangunan rumah ibadah, nampaknya merupakan imbas dari modernisasi yang belum selesai di Negara-negara miskin. Faktor marginalisasi penduduk asli (baca: umat Islam) dalam merespon dan lemahnya pemerintah daerah dan investor asing maupun domestik yang kurang memaksimalkan perhatiannya pada *community development*, adalah faktor-faktor yang menimbulkan maraknya sikap radikalisme beragama.

### C. SOLUSI ALTERNATIF

Masalah radikalisme saat ini memang sudah marak terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia sendiri. Pengaruh radikalisme yang

<sup>11</sup> Mulyana, W. Kusuma, "Analisis Sosial tentang Kerusuhan Massa Kasus Pemilu 1997", dalam Ahmad Suaedy (ed.), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, (Jakarta: Grasindo-P3M, 2000), h. 71.

<sup>12</sup> Mulyana, W. Kusuma, "Analisis Sosial...", *ibid.*, h. 69.



merupakan suatu pemahaman baru yang dibuat-buat oleh pihak tertentu mengenai suatu hal, seperti agama, sosial, dan politik, seakan menjadi semakin rumit karena berbaur dengan tindak terorisme yang cenderung melibatkan tindak kekerasan. Berbagai tindakan terror yang tak jarang memakan korban jiwa seakan menjadi cara dan senjata utama bagi para pelaku radikal dalam menyampaikan pemahaman mereka dalam upaya untuk mencapai sebuah perubahan. Dalam hal ini, tentunya bukan hanya kalangan pemerintah saja yang dapat mengambil bagian untuk mencegah dan mengatasinya, namun seluruh rakyat harusnya juga ikut terlibat dalam usaha tersebut, terutama para kaum pemuda-pemuda. Hal ini dikarenakan kaum pemudalah yang nantinya merupakan generasi penerus bangsa ini sekaligus menjadi ujung tombak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan akan kedua masalah tersebut, yaitu radikalisme dan terorisme agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan. Hal yang paling mencolok untuk dapat mengambil peran dalam mengatasi masalah ini ialah para generasi muda, seperti halnya mahasiswa yang merupakan *agent of change* bangsa ini. Di samping juga anak-anak yang masih dalam tahap pembentukan pribadinya sehingga memerlukan bimbingan khusus dari orang tua tentunya agar nantinya tidak terseret dalam paham radikalisme.

Berbagai cara mencegah radikalisme agar tidak semakin menjamur, antara lain:

***Pertama, memperkenalkan Ilmu Pengetahuan dengan Baik dan Benar***

Hal pertama yang dapat dilakukan untuk mencegah paham radikalisme ialah memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Pengenalan tentang ilmu pengetahuan ini harusnya sangat ditekankan kepada siapapun, terutama kepada para generasi muda. Hal ini disebabkan pemikiran para generasi muda yang masih mengembara karena rasa keingintahuannya, apalagi terkait suatu hal yang baru seperti sebuah pemahaman terhadap suatu masalah dan dampak pengaruh globalisasi. Dalam hal ini, memperkenalkan ilmu pengetahuan bukan hanya sebatas ilmu umum saja, tetapi juga ilmu agama yang merupakan pondasi penting terkait perilaku, sikap, dan juga keyakinannya kepada Tuhan. Kedua ilmu ini harus diperkenalkan secara baik dan benar, dalam artian haruslah seimbang antara ilmu umum dan ilmu agama. Sedemikian sehingga dapat tercipta kerangka pemikiran yang seimbang dalam diri.

***Kedua, memahami Ilmu Pengetahuan dengan Baik dan Benar***

Hal kedua yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme ialah memahami ilmu pengetahuan dengan baik dan



benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahami ilmu pengetahuan tersebut. Karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal, pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Sedemikian sehingga apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum dan ilmu agama sudah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, maka tidak akan mudah goyah dan terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme sekaligus tindakan terorisme dan tidak menjadi penyebab luntarnya bhinneka tunggal ika sebagai semboyan Indonesia.

#### ***Ketiga, meminimalisir Kesenjangan Sosial***

Kesenjangan sosial yang terjadi juga dapat memicu munculnya pemahaman radikalisme. Jika tingkat pemahaman radikalisme tidak ingin terjadi pada suatu Negara termasuk Indonesia, maka kesenjangan antara pemerintah dan rakyat haruslah diminimalisir. Caranya ialah pemerintah harus mampu merangkul pihak media yang menjadi perantaranya dengan rakyat sekaligus melakukan aksi nyata secara langsung kepada rakyat. Begitu pula dengan rakyat, mereka harusnya juga selalu memberikan dukungan dan kepercayaan kepada pihak pemerintah bahwa pemerintah

akan mampu menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengayom rakyat dan pemegang kendali pemerintahan Negara.

#### ***Keempat, mendukung Aksi Perdamaian***

Aksi perdamaian mungkin secara khusus dilakukan untuk mencegah tindakan radikalisme agar tidak terjadi. Kalau pun sudah terjadi, maka aksi ini dilakukan sebagai usaha agar tindakan tersebut tidak semakin meluas dan dapat dihentikan. Namun apabila kita tinjau lebih dalam bahwa munculnya tindakan radikalisme dapat berawal dari muncul pemahaman yang sifatnya baru, berbeda, dan cenderung menyimpang sehingga menimbulkan pertentangan dan konflik. Oleh karena itu, salah satu cara untuk mencegah agar hal tersebut (pemahaman radikalisme) tidak terjadi ialah dengan cara memberikan dukungan terhadap aksi perdamaian yang dilakukan, baik oleh Negara (pemerintah), organisasi/ ormas maupun perseorangan.

#### ***Kelima, berperan Aktif dalam Melaporkan Radikalisme***

Peranan yang dilakukan di sini ialah ditekankan pada aksi melaporkan kepada pihak-pihak yang memiliki kewenangan apabila muncul pemahaman radikalisme, entah itu kecil maupun besar. Contohnya apabila muncul pemahaman baru tentang keagamaan di masyarakat yang menimbulkan keresahan, maka

hal pertama yang bisa dilakukan agar pemahaman radikalisme tidak berkembang hingga menyebabkan tindakan yang berbau kekerasan dan konflik ialah melaporkan atau berkonsultasi kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di lingkungan tersebut. Dengan demikian, pihak tokoh-tokoh dalam mengambil tindakan pencegahan awal, seperti melakukan diskusi tentang pemahaman baru yang muncul di masyarakat tersebut dengan pihak yang bersangkutan.

#### ***Keenam, meningkatkan Pemahaman Akan Hidup Kebersamaan***

Meningkatkan pemahaman tentang hidup kebersamaan juga harus dilakukan untuk mencegah munculnya pemahaman radikalisme. Meningkatkan pemahaman ini ialah terus mempelajari dan memahami tentang artinya hidup bersama-sama dalam bermasyarakat bahkan bernegara yang penuh akan keberagaman, termasuk Indonesia sendiri. Sehingga sikap toleransi dan solidaritas perlu diberlakukan, di samping menaati semua ketentuan dan peraturan yang sudah berlaku di masyarakat dan Negara. Dengan demikian, pasti tidak akan ada pihak-pihak yang merasa dirugikan karena kita sudah paham menjalani hidup secara bersama-sama berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan di tengah-tengah masyarakat dan Negara.

#### ***Ketujuh, konfirmasi terhadap Informasi yang diperoleh (tabayyun)***

Melakukan konfirmasi terhadap informasi yang diperoleh (terutama via medsos) juga merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme. Hal ini dikarenakan informasi yang didapatkan tidak selamanya benar dan harus diikuti, terlebih dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, di mana informasi bisa datang dari mana saja. Sehingga penyaringan terhadap informasi tersebut harus dilakukan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, di mana informasi yang benar menjadi tidak benar dan informasi yang tidak benar menjadi benar. Oleh karena itu, kita harus bisa menyaring informasi yang didapat sehingga tidak sembarangan membenarkan, menyalahkan, dan terpengaruh untuk langsung mengikuti informasi tersebut.

#### **D. PENUTUP**

Sebagai negara yang kuat memegang nilai-nilai keagamaan, Indonesia telah menjalankan nuansa agamis bagi aparatur dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan tidak koruptif dalam merancang dan mengimplementasikan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, pengaturan dan pembangunan sarana publik. Penekanan nilai-nilai keagamaan dalam segala aspek pembangunan tampak jelas dalam

"Meningkatkan Peran Serta Institusi Keagamaan Dalam Pembangunan Di Segala Bidang".

Secara kultur keagamaan, juga dikenal sebagai masyarakat yang kuat memegang nilai-nilai keagamaan. Tradisi keagamaan seperti pengajian rutin majelis ta'lim, ceramah agama, tahlil, shalawat dan ratiban, tetap dipegang sebagai nilai-nilai keagamaan yang telah berjalan sejak lama. Bahkan saat ini, pendidikan keagamaan tradisional yang terlembagakan dalam pondok pesantren tetap eksis.

Dalam konteks yang sama, kondisi ini pun tak jauh dengan pemahaman tentang pluralisme atau kerukunan antar umat beragama. Sejak dahulu, masyarakat telah diajarkan untuk hidup berdampingan dengan berbagai kalangan agama, etnis, suku, ras, dan lain sebagainya. Sikap toleran hanya bisa berjalan jika antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya saling menghormati dan menghargai, serta mengindahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembangunan dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui tulisan ini tergambar bahwa masalah radikalisme dan pemahaman tentang pluralisme agama tidak murni selalu berkaitan dengan pemahaman teologi. Namun juga terkait dengan realitas ekonomi tempat masyarakat itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa masalah kerukunan antarumat beragama berhubungan dengan sejumlah faktor seperti ekonomi, politik dan budaya. Untuk itu, segala penyelesaian yang berhubungan dengan konflik bernuansa agama seyogyanya perlu dilihat sebagai bentuk lain dari kompensasi terhadap realitas social, dan tidak murni melulu berkaitan dengan agama. *Wallahua'alma bi al shawab.*



## Daftar Pustaka

Azyumardi Azra, Dr., *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme Modernisme hingga Postmodernisme*, Jakarta, Paramadina, 1996

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bekasi Tahun 2001.

Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo dalam Bahtiar Effendi dan Hendro Prasetyo (peny.), *Radikalisme Agama*, Jakarta, PPIM-IAIN, 1998

\_\_\_\_\_, *Repolitikasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?* Bandung, Mizan, 2000

Budiman, A. (1997). *Teori Negara, Negara, Kekuasaan Dan Ideologi*. Jakarta DKI, Indonesia: PT Gramedia Pustaka Utama.

Budhy Munawar-Rachman, *Ensiklopedi Nurcholish Madjid*, Jld. I, Jakarta Paramadina-Mizan-CSL, 2006

Bulkin, F. (1984, Februari 2). *Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara Sebuah Catatan Penelitian*. Prisma, 7.

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial*, terj. Helly P. Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

*Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta, Dian Interfidei, 1993

Hadiz, V. R. (1999). *Politik Pembebasan: Teori-Teori Negara Pasca Kolonial* Yogyakarta, DIY, Indonesia: Pustaka Pelajar.

Hassan Hanafi, *Agama, Kekerasan dan Islam Kontemporer*, terj. Ahmad Najib, Yogyakarta, Jendela, 2001

J.B. Banawiratma, SJ., "Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain: Perspektif Gereja Katolik", dalam *Dialog: Kritik dan Identitas Agama*, Yogyakarta, Dian Interfidei, 1993.

John L. Esposito, *The Islamic Threat Myth or Reality?*, Oxford, Oxford University Press, 1992

Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas: Moralitas Agama dan Krisis Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Muhammad Abid Al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syariah*, terj., Yogyakarta, Fajar Pustaka, 2001

Mulyana, W. Kusuma, "Analisis Sosial tentang Kerusuhan Massa Kasus Pemilu 1997", dalam Ahmad Suaedy (ed.), *Kekerasan dalam Perspektif Pesantren*, Jakarta, Grasindo-P3M, 2000

M. Habib Mustopo, *Ilmu Budaya Dasar: Kumpulan Essay Manusia dan Budaya Surabaya:1979*. Usaha Nasional

- Oliver Roy, *The Failure of Political Islam*, London, I.B. Tauris & Co. Ltd., 1994
- Rosniati Hakim, Pengantar Studi Islam Padang:2003
- Sudirman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001.
- Stepan, Alfred. (1996). *Militer dan Demokratisasi*, Jakarta: Grafit